



e-ISSN 3032-601X & p-ISSN 3032-7105

Vol. 1, No. 2, Tahun 2024

MISTER

**Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,
Technology and Educational Research**

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
KOTA BANDA ACEH**

mister@serambimekkah.ac.id

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology
and Educational Research

Journal of MISTER

Vol. 1, No. 2, 2024

Pages: 251-262

Analisis dalam Menguraikan dan Memproyeksikan Ragam Organisasi Publik di Indonesia

Rika Aprilliyanti, Eli Apud Saepudin, Surni Ernawati, M Afan,
Ahmad Ripa' i, Ulpi Fitriani

Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bina
Bangsa, Kota Serang Banten, Indonesia

Article in Journal of MISTER

Available at : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister>

DOI : <https://doi.org/10.32672/mister.v1i2.1477>

How to Cite this Article

APA : Aprilliyanti, R., Saepudin, E. A., Ernawati, S., M Afan, Ripa' i, A., & Fitriani, U. (2024). Analisis dalam Menguraikan dan Memproyeksikan Ragam Organisasi Publik di Indonesia. *MISTER: Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 1(2), 247 - 258. <https://doi.org/10.32672/mister.v1i2.1477>

Others Visit : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister>

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



ISSN 3032-7105

ISSN 3032-601X



9 773032 710001 9 773032 601002

Analisis dalam Menguraikan dan Memproyeksikan Ragam Organisasi Publik di Indonesia

Rika Aprilliyan¹, Eli Apud Saepudin², Surni Ernawati³, M Afan⁴, Ahmad Ripa'i⁵, Ulpi Fitriani⁶

Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Bina Bangsa, Kota Serang, Indonesia¹²³⁴⁵⁶

Email:

rikaaprillia02@gmail.com¹, eli.apud.saepudin@binabangsa.ac.id², surniernawati14@gmail.com³,
muhamadamanda23@gmail.com⁴, ahmadripai740@gmail.com⁵, ulpiftr12@gmail.com⁶.

Diterima: 04-04-2024

| Disetujui: 07-04-2024

| Diterbitkan: 16-04-2024

ABSTRACT

The purpose of the analysis is to describe and project the variety of public organizations in Indonesia to understand the dynamics of public organizations in Indonesia and can become a basis for formulating appropriate policies in managing organizations in the future. Public organizations are the largest organizations that accommodate all levels of society within the scope of the State and have legitimate (legitimized) authority in the fields of politics, government administration and law in an institutionalized manner so that they have the obligation to protect their citizens and serve their needs, on the other hand, they also have the right to collect taxes for funding, as well as imposing penalties as regulatory enforcement sanctions. The data analysis technique used is a qualitative analysis technique. The results of this analysis show that in Indonesia, there are various types of public organizations that have different roles and functions in government and society, such as government institutions to BUMN, BUMD, community organizations, NGOs and international organizations. These various public organizations have an important role in development and governance in Indonesia, and play different roles in supporting the various needs of society and the state.

Keywords: Describe, Project, Variety, Public Organization

ABSTRAK

Tujuan dari menganalisis dalam menguraikan dan memproyeksikan ragam organisasi publik di Indonesia untuk memahami dinamika organisasi publik di Indonesia dan dapat menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan yang tepat dalam mengelola organisasi di masa depan. Organisasi publik adalah organisasi yang terbesar yang mewadahi seluruh lapisan masyarakat dengan ruang lingkup Negara dan mempunyai kewenangan yang absah (terlegitimasi) di bidang politik, administrasi pemerintahan, dan hukum secara terlembaga sehingga mempunyai kewajiban melindungi warga negaranya, dan melayani keperluannya, sebaliknya berhak pula memungut pajak untuk pendanaan, serta menjatuhkan hukuman sebagai sanksi penegakan peraturan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa di Indonesia, terdapat berbagai ragam organisasi publik yang memiliki peran dan fungsi yang berbeda dalam pemerintahan dan masyarakat seperti lembaga pemerintahan hingga BUMN, BUMD, Organisasi kemasyarakatan, LSM, dan organisasi internasional. Ragam organisasi publik ini memiliki peran yang penting dalam pembangunan dan pemerintahan di Indonesia, dan memainkan peran yang berbeda dalam menyongkong berbagai kebutuhan masyarakat dan negara.

Kata kunci : Menguraikan, Memproyeksikan, Ragam, Organisasi Publik

PENDAHULUAN

Organisasi berasal dari kata Yunani organon, dan istilah Latin organum yang berarti alat, bagian, anggota atau badan. Menurut pendapat para ahli; James D Mooney mengatakan, “Organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama”. Sedangkan Chester I Barnard memberi pengertian organisasi sebagai suatu sistem dari aktifitas kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Chester I Barnard melihat organisasi itu merupakan suatu susunan skematis “dimana tergambar” sistem daripada aktifitas kerja sama. Selanjutnya menurut Prajudi Atmosudirdjo organisasi adalah Struktur tata pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara kelompok orang pemegang posisi yang bekerjasama secara tertentu untuk tujuan tertentu. Dari beberapa definisi di atas dapatlah dikatakan bahwa definisi dari organisasi itu adalah sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu atau beberapa tujuan tertentu. Sedangkan menurut Achmad Sobirin (2009:5) organisasi adalah unit sosial yang sengaja didirikan untuk jangka waktu yang relatif lama, beranggotakan dua orang atau lebih yang bekerja bersama-sama dan terkoordinasi, mempunyai pola kerja tertentu yang terstruktur, dan didirikan untuk mencapai tujuan bersama atau satu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Publik berasal dari bahasa latin “Public” yang berarti “of people” berkenaan dengan masyarakat. Mengenai pengertian publik, Inu Kencana Syafie dkk (1999) memberikan pengertian sebagai berikut: “Sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki”. Itulah sebabnya, Inu Kencana Syafie dkk., mengatakan bahwa publik tidak langsung diartikan sebagai penduduk, masyarakat, warga negara ataupun rakyat, karena kata-kata tersebut berbeda. Organisasi publik sering dilihat pada bentuk organisasi pemerintah yang dikenal sebagai birokrasi pemerintah (organisasi pemerintahan).

Menurut Wursanto (2002: 259), yang dimaksud dengan Teori Organisasi adalah suatu konsepsi, pandangan, tinjauan, ajaran, pendapat atau pendekatan tentang pemecahan masalah organisasi sehingga dapat lebih berhasil, sehingga organisasi dapat mencapai sasaran yang ditetapkan.

Menurut Prof. Dr. Taliziduhu Ndraha Organisasi publik adalah organisasi yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa publik dan layanan sipil. Organisasi publik adalah organisasi yang terbesar yang mewadahi seluruh lapisan masyarakat dengan ruang lingkup Negara dan mempunyai kewenangan yang absah (terlegitimasi) di bidang politik, administrasi pemerintahan, dan hukum secara terlembaga sehingga mempunyai kewajiban melindungi warga negaranya, dan melayani keperluannya, sebaliknya berhak pula memungut pajak untuk pendanaan, serta menjatuhkan hukuman sebagai sanksi penegakan peraturan.

Menurut Schraeder, Tears, & Jordan, Pengembangan organisasi publik membahas konsep, filosofi, teori dan praktek pengembangan organisasi publik melalui berbagai strategi intervensi perubahan. Perubahan organisasi publik membahas tentang proses organisasi publik tumbuh berkembang dan bertransformasi. Dalam perubahan tersebut melibatkan struktur, proses, orang, pola pikir dan budaya kerja. Kepustakaan pengembangan organisasi publik saat ini telah berkembang pesat dengan berbagai kajian multidisiplin yang menghadirkan berbagai pendekatan pengelolaan perubahan organisasi di era globalisasi, termasuk didalamnya membahas tentang konsep teknostruktur organisasi serta transformasi organisasi menjadi organisasi publik pembelajar. Salah satu kajian dalam pengembangan organisasi publik yang menarik banyak perhatian adalah kajian mengenai reformasi organisasi publik.

Organisasi ini bertujuan untuk melayani kebutuhan masyarakat demi kesejahteraan sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi sebagai pijakan dalam operasionalnya. Organisasi publik berorientasi pada

pelayanan kepada masyarakat tidak pada profit/laba/untung. Miftah Thoha telah memprediksi organisasi-organisasi dimasa mendatang yang salah satunya di bidang penataan organisasi, dimana organisasi dimasa mendatang akan mempunyai sifat-sifat yang unik. Struktur organisasi formal akan mengalami penambahan dan perubahan yang bervariasi, sehingga banyak dijumpai organisasi-organisasi baru tanpa menganalisis lebih lanjut struktur formal yang ada. Sehingga banyak dijumpai organisasi-organisasi tandingan yang nonstruktural. Keadaan seperti ini sering dinamakan gejala proliferasi dalam organisasi. Suatu pertumbuhan yang cepat dari suatu organisasi, sehingga banyak dijumpai organisasi-organisasi formal yang nonstruktural yang dibentuk untuk menerobos kesulitan birokrasi. Pengembangan organisasi publik membahas konsep, filosofi, teori dan praktek pengembangan organisasi publik melalui berbagai strategi intervensi perubahan. Perubahan organisasi publik membahas tentang proses organisasi publik tumbuh, berkembang dan bertransformasi (Schraeder, Tears, & Jordan, 2005). Dalam perubahan tersebut melibatkan struktur, proses, orang, pola pikir dan budaya kerja. Kepustakaan pengembangan organisasi publik saat ini telah berkembang pesat dengan berbagai kajian multidisiplin yang menghadirkan berbagai pendekatan pengelolaan perubahan organisasi di era globalisasi, termasuk didalamnya membahas tentang konsep teknostruktur organisasi serta transformasi organisasi menjadi organisasi publik pembelajar.

Penelitian yang dilakukan oleh Aykac & Metin (2012) tentang masa depan organisasi public (The future of public organizations) menunjukkan bahwa organisasi publik sebagai komponen terpenting dari administrasi publik sangat dipengaruhi oleh proses perubahan, dan terkait hal tersebut maka Aykac & Metin memprediksikan masa depan yang akan dihadapi organisasi publik adalah pertama struktur organisasi yang fleksibel akan meningkat, kedua birokrasi tidak akan berkurang meskipun ada peningkatan fleksibilitas, ketiga perdebatan tentang kualitas layanan publik akan terus berlanjut, keempat kekuatan teknologi informasi akan semakin ditekankan, dan kelima kualitas pemimpin administrator dalam administrasi publik akan semakin diperhatikan. Proyeksi masa depan tersebut tentunya menuntut organisasi publik agar memiliki kemampuan melakukan perubahan menyesuaikan dengan kondisi yang dihadapi.

Organisasi merupakan sebagai tempat atau wadah untuk orang berkumpul dan bekerja sama secara rasional dan sistematis, terencana, terpimpin, dan terkendali, dalam memanfaatkan sumber daya baik uang, metode, material, lingkungan, data, sarana dan prasarana dan sebagainya yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi.

Salah satu kajian dalam pengembangan organisasi publik yang menarik banyak perhatian adalah kajian mengenai reformasi organisasi publik. Di Indonesia, terdapat berbagai ragam organisasi publik yang memiliki peran dan fungsi yang berbeda dalam pemerintahan dan masyarakat. Organisasi-organisasi publik atau biasa dikenal dengan BLU merupakan instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik (Sinambela, 2006 : 4-5). Dan menurut Giroonroos dalam Hastono (2008 : 7) Pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen/ pelanggan. Banyak Beragam Jenis Organisasi Publik di Indonesiaseperti BUMN. Suprayitno, dkk (2005) internalisasi prinsip-prinsip GCG sangat diperlukan, karena mampu mendukung terciptanya pengelolaan perusahaan secara profesional,

transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Penelitian Brealy et al (1996) memberikan bukti bahwa perusahaan yang menerapkan GCG kinerjanya memiliki kecenderungan meningkat, implementasi corporate governance dengan konsisten dalam jangka panjang dapat meningkatkan kinerja perusahaan serta bermanfaat bagi pemegang saham. Keberhasilan penerapan GCG dalam suatu perusahaan sangat didukung oleh organ perusahaan, dan struktur kepemilikan. Organ perusahaan dan struktur kepemilikan memiliki fungsi memonitoring kinerja dan pengelolaan perusahaan oleh manajer dalam mencapai tujuan dan peningkatan kinerja perusahaan. Ketaatan pada peraturan kerja Ketaatan/kepatuhan adalah sifat tunduk terhadap sesuatu yang dianggap mengikat dan memiliki kedudukan lebih tinggi. Misal: taat kepada peraturan sekolah, taat kepada atasan di kantor, taat kepada Tuhan, dll. Karyawan yang taat pada peraturan kerja tidak akan melalaikan prosedur kerja dan akan selalu mengikuti pedoman kerja yang ditetapkan oleh perusahaan (Hasibuan, 2017:194).

Adapun ragam organisasi publik lainnya yaitu, organisasi Kemasyarakatan selanjutnya disingkat (ormas) merupakan peran serta masyarakat dalam melaksanakan pembangunan untuk memajukan kehidupan yang berkeadilan dan kemakmuran. Keberadaan organisasi kemasyarakatan di Indonesia sebenarnya sudah terbentuk semenjak awal abad ini dan mempunyai kedudukan paling strategis bagi proses kebangsaan Indonesia. Bahkan sebagian dari organisasi kemasyarakatan tersebut akhirnya menjadi partai politik yang memelopori gerakan kebangsaan. Eksistensi organisasi kemasyarakatan pada masa kini harus mampu membawa dan memperjuangkan aspirasi dan kehendak masyarakat sebagai medium untuk melaksanakan kegiatan yang edukatif dan bernilai sehingga bermanfaat demi kepentingan bersama yang sejalan dengan amanat Pancasila. Walaupun kodrat sebuah organisasi memiliki pasang-surut dalam menjalankan roda organisasinya. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan sebuah lembaga non pemerintah yang mempunyai peranan sebagai jembatan dari masyarakat terhadap pemerintah. LSM mempunyai peran yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat. dan melihat LSM sebagai alternatif untuk munculnya civil society (Affan Gaffar : 2006). Dalam perannya LSM harus mengetahui tugas dan fungsi. Suatu organisasi pasti memiliki program kerja yang akan dilakukan guna mencapai tujuannya.

Organisasi non-pemerintah yang bergerak dalam berbagai bidang seperti lingkungan, hak asasi manusia, kesehatan, dan pendidikan. Organisasi yang bersifat internasional dan memiliki kantor perwakilan di Indonesia, seperti PBB, IMF, dan Bank Dunia. PBB merupakan sebuah lembaga institusional yang memiliki cakupan global yang bertujuan untuk mendorong adanya kerjasama antara negara-negara di dunia. Kerjasama yang dibentuk ini merupakan sebuah momentum yang dibuat untuk menjadikan dunia bersatu sehingga bisa mengurangi kemungkinan-kemungkinan terjadinya konflik atau perang di masa depan. Hal ini menjadi sebuah hal yang dilematis karena di satu sisi PBB tidak bisa secara penuh memaksa suatu negara untuk tunduk, dan di satu sisi PBB juga memiliki misi untuk mencegah terjadinya konflik atau perang (Suryokusumo, 2012). Namun, PBB memiliki kebiasaan untuk memberikan sanksi kepada negara yang kurang patuh terhadap amanat dari piagam maupun resolusi yang telah ditetapkan. IMF adalah lembaga sentral dari sistem moneter internasional yaitu sistem pembayaran dan nilai tukar internasional di antara mata-mata uang nasional yang memungkinkan dilaksanakannya kegiatan bisnis di antara negara-negara di dunia.

Bank Dunia atau yang kita kenal dengan sebutan World Bank adalah lembaga keuangan internasional yang berafiliasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). World Bank dirancang untuk membiayai proyek-proyek pembangunan pada negara anggota. Adapun, kantor pusat World Bank sendiri terletak di Washington DC, Amerika Serikat. Selain itu, World Bank juga memberikan bantuan berupa

teknikal dan saran regulasi ekonomi. Lembaga ini pun turut mengawasi pelaksanaan pasar bebas termasuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Bersama dengan International Monetary Fund (IMF) dan Organisasi Perdagangan Dunia, World Bank terlibat dalam kegiatan reformasi lembaga publik di negara berkembang. Ragam organisasi publik ini memiliki peran yang penting dalam pembangunan dan pemerintahan di Indonesia, dan memainkan peran yang berbeda dalam menyokong berbagai kebutuhan masyarakat dan negara.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan ini yakni metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis ragam organisasi publik di Indonesia. Analisis dokumen dilakukan untuk menganalisis dokumen-dokumen terkait dengan analisis dalam menguraikan dan memproyeksikan ragam organisasi publik di Indonesia. Analisis data dilakukan dengan mengkategorikan, menafsirkan, dan menganalisis data yang diperoleh dari observasi, dan analisis dokumen. kebijakan publik, dan laporan kegiatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut adalah beberapa jenis organisasi publik yang umum di Indonesia antara lain:

1. Lembaga Pemerintahan : Meliputi lembaga legislatif (DPR, DPD), lembaga eksekutif (Presiden, Kementerian), dan lembaga yudikatif (Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi).

Struktur organisasi dari Lembaga Pemerintahan :

- a. Struktur Hierarki : Terdapat struktur hierarki yang jelas, dimulai dari level paling atas (Presiden, Menteri) hingga level paling bawah (pegawai administrasi).
- b. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab : Tugas dan tanggung jawab diatur berdasarkan bidang atau departemen, misalnya Kementerian Keuangan bertanggung jawab atas kebijakan keuangan negara.
- c. Hubungan Antar Bagian : Hubungan antar bagian diatur berdasarkan koordinasi dan komunikasi yang berlangsung dari level atas ke bawah.

Berikut adalah peran dan fungsi umum yang dimiliki Lembaga Pemerintahan :

- a) Peran Ekonomi : Menyusun kebijakan ekonomi, mengelola keuangan negara, dan mengawasi pelaksanaan program pembangunan ekonomi.
 - b) Peran Sosial : Menyediakan pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan sosial, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - c) Peran Politik : Menjaga stabilitas politik, mengatur penyelenggaraan pemilihan umum, dan melindungi hak-hak politik warga negara.
2. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) : Perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah, seperti PT. PLN (Persero), PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk, dan PT. Pertamina (Persero).

Berikut adalah struktur organisasi dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN):

- a. Struktur Hierarki : Memiliki struktur hierarki yang mirip dengan perusahaan swasta, dimulai dari direksi hingga karyawan operasional.

- b. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab : Tugas dan tanggung jawab diatur berdasarkan unit kerja atau departemen, seperti bagian pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia.
- c. Hubungan Antar Bagian: Hubungan antar bagian diatur berdasarkan alur kerja yang mengikuti proses bisnis perusahaan.

Berikut adalah peran dan fungsi umum yang dimiliki Badan Usaha Milik Negara (BUMN) :

- a) Peran Ekonomi : Mengelola sektor-sektor strategis dalam perekonomian, seperti energi, transportasi, dan telekomunikasi, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi negara.
- b) Peran Sosial : Menyediakan pelayanan publik dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.
- c) Peran Politik : Mewakili kepentingan negara dalam bidang-bidang ekonomi tertentu di tingkat nasional maupun internasional.

- 3. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) : Perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, seperti PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum), Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya (Sarana Jaya), dan lain-lain.

Struktur organisasi dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) :

- a. Struktur Hierarki : Struktur hierarki serupa dengan BUMN, tetapi lebih terfokus pada kepentingan daerah tempat BUMD beroperasi.
- b. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab : Tugas dan tanggung jawab diatur berdasarkan kebutuhan pelayanan publik di daerah tersebut.
- c. Hubungan Antar Bagian : Hubungan antar bagian diatur untuk memastikan sinergi dan efisiensi dalam pelayanan publik di daerah tersebut.

Berikut adalah peran dan fungsi umum yang dimiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) :

- a) Peran Ekonomi : Mengelola aset daerah dan memberikan kontribusi dalam pembangunan ekonomi daerah.
- b) Peran Sosial : Menyediakan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat di tingkat daerah.
- c) Peran Politik : Mendukung kebijakan pembangunan daerah yang diambil oleh pemerintah daerah.

- 4. Organisasi Kemasyarakatan yang meliputi organisasi sosial, keagamaan, dan profesi yang memiliki peran dalam kegiatan sosial dan pembangunan masyarakat, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Struktur organisasi dari Organisasi Kemasyarakatan:

- a. Struktur Hierarki : Struktur hierarki bervariasi tergantung pada jenis organisasi, misalnya organisasi keagamaan dapat memiliki struktur yang dipimpin oleh pemimpin agama tertinggi.
- b. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab : Tugas dan tanggung jawab diatur berdasarkan kegiatan sosial atau keagamaan yang dilakukan oleh organisasi tersebut.
- c. Hubungan Antar Bagian : Hubungan antar bagian diatur berdasarkan prinsip kepemimpinan dan koordinasi dalam mencapai tujuan organisasi.

Berikut adalah peran dan fungsi umum yang dimiliki Organisasi Kemasyarakatan :

- a) Peran Ekonomi : Memberikan pelatihan dan bantuan kepada masyarakat untuk meningkatkan keterampilan dan kesejahteraan ekonomi.
- b) Peran Sosial : Memberikan pelayanan sosial, seperti bantuan kemanusiaan, pendidikan, dan kesehatan, kepada masyarakat yang membutuhkan.

- c) Peran Politik : Mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat dalam berbagai bidang kepada pemerintah dan lembaga lainnya.
5. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Adapun struktur organisasi LSM dapat bervariasi tergantung pada ukuran dan kompleksitas organisasi tersebut. Namun, secara umum, struktur organisasi LSM dapat diuraikan sebagai berikut :
- a. Struktur Hierarki :
- Pimpinan : Biasanya terdapat seorang direktur atau ketua yang bertanggung jawab atas keseluruhan operasional LSM.
 - Dewan Pengurus : Merupakan badan yang bertugas mengatur kebijakan dan strategi LSM.
 - Staf dan Relawan : Meliputi karyawan dan relawan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program dan kegiatan LSM.
- b. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab :
- Pimpinan : Bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis dan arahan umum LSM.
 - Dewan Pengurus : Bertugas mendukung dan mengawasi kinerja pimpinan serta mengambil keputusan penting terkait dengan kebijakan dan program LSM.
 - Staf: Bertanggung jawab atas pelaksanaan program-program LSM sesuai dengan arahan dari pimpinan dan dewan pengurus.
 - Relawan : Melakukan berbagai tugas sesuai dengan kebutuhan program, seperti advokasi, penelitian, atau kegiatan lapangan lainnya.
- c. Hubungan Antar Bagian :
- Pimpinan dan Dewan Pengurus: Hubungan ini bersifat koordinatif, di mana pimpinan memberikan laporan dan dewan pengurus memberikan arahan dan evaluasi.
 - Dewan Pengurus dan Staf: Dewan pengurus memberikan arahan kepada staf melalui pimpinan atau manajer program.
 - Staf dan Relawan: Staf biasanya menjadi koordinator atau supervisor bagi relawan dalam menjalankan tugas-tugasnya.
- Hubungan antar bagian dalam LSM didasarkan pada prinsip kerja sama dan kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama dalam melayani masyarakat atau isu tertentu yang menjadi fokus LSM tersebut. Berikut adalah peran dan fungsi umum yang dimiliki Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) :
- a) Peran Ekonomi : Mengawal kebijakan ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam untuk memastikan keadilan dan keberlanjutan ekonomi.
- b) Peran Sosial : Memberikan bantuan dan advokasi untuk masyarakat yang rentan dan memperjuangkan hak asasi manusia.
- c) Peran Politik : Membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses politik dan pemerintahan serta mengawasi jalannya pemerintahan untuk mewujudkan good governance.
6. Organisasi Internasional : Organisasi yang bersifat internasional dan memiliki kantor perwakilan di Indonesia, seperti PBB, IMF, dan Bank Dunia. Ragam organisasi publik ini memiliki peran yang penting dalam pembangunan dan pemerintahan di Indonesia, dan memainkan peran yang berbeda dalam menyokong berbagai kebutuhan masyarakat dan negara. Struktur organisasi organisasi internasional juga

dapat bervariasi tergantung pada sifat dan tujuan organisasi tersebut. Namun, umumnya, struktur organisasi organisasi internasional dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Struktur Hierarki :

- Pimpinan Tertinggi : Biasanya terdapat seorang kepala organisasi atau direktur eksekutif yang bertanggung jawab atas keseluruhan operasional organisasi internasional.
- Dewan Pimpinan : Merupakan badan yang terdiri dari perwakilan negara-negara anggota atau pihak-pihak yang berkepentingan yang bertugas mengatur kebijakan dan strategi organisasi internasional.
- Sekretariat : Memiliki struktur hierarki sendiri yang terdiri dari berbagai divisi atau unit kerja.

b. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab:

- Pimpinan Tertinggi : Bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis dan arahan umum organisasi internasional.
- Dewan Pimpinan : Bertugas mendukung dan mengawasi kinerja pimpinan tertinggi serta mengambil keputusan penting terkait dengan kebijakan dan program organisasi internasional.
- Sekretariat : Bertanggung jawab atas pelaksanaan program-program organisasi internasional sesuai dengan arahan dari pimpinan tertinggi dan dewan pimpinan.

c. Hubungan Antar Bagian:

- Pimpinan Tertinggi dan Dewan Pimpinan : Hubungan ini bersifat koordinatif, di mana pimpinan tertinggi memberikan arahan dan menerima masukan dari dewan pimpinan.
- Dewan Pimpinan dan Sekretariat : Dewan pimpinan memberikan arahan kepada sekretariat melalui pimpinan sekretariat atau direktur program.
- Sekretariat dan Divisi/Unit Kerja : Hubungan ini bersifat koordinatif, di mana setiap divisi atau unit kerja bertanggung jawab atas tugas dan program-program tertentu yang mendukung tujuan organisasi internasional tersebut.

Hubungan antar bagian dalam organisasi internasional didasarkan pada prinsip kerja sama lintas batas dan kerjasama antarnegara untuk mencapai tujuan bersama dalam skala global.

Organisasi internasional memiliki peran yang penting dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan politik di Indonesia. Beberapa peran dan fungsi umum yang dimiliki oleh organisasi internasional di Indonesia meliputi:

- a. Pembangunan Ekonomi : Memberikan bantuan teknis dan finansial untuk proyek-proyek pembangunan ekonomi di Indonesia. Mendorong investasi asing dan kerja sama ekonomi antar negara. Memberikan akses pasar yang lebih luas bagi produk-produk Indonesia melalui perjanjian perdagangan internasional.
- b. Pembangunan Sosial : Mendukung program-program pembangunan sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Memberikan bantuan dalam penanggulangan bencana alam dan krisis kemanusiaan. Memperjuangkan hak asasi manusia dan kesetaraan gender di Indonesia.
- c. Pembangunan Politik : Mendukung upaya penguatan demokrasi dan good governance di Indonesia. Memberikan bantuan dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan penguatan lembaga-lembaga demokrasi. Mendorong perdamaian dan stabilitas politik di Indonesia melalui diplomasi dan mediasi.

Organisasi internasional juga berperan sebagai forum bagi negara-negara anggota untuk berdiskusi, berkoordinasi, dan bekerja sama dalam menangani isu-isu global dan regional. Melalui peran dan fungsi

ini, organisasi internasional berusaha untuk mendukung pembangunan Indonesia secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Organisasi sektor publik merupakan suatu entitas yang menjalankan tugasnya untuk kepentingan publik. Karakteristik organisasi sektor publik berbeda dengan organisasi swasta. Menurut Ulum (2010), beberapa karakteristik organisasi sektor publik adalah sebagai berikut:

1. Sumber daya organisasi diperoleh dari hibah atau sumbangan para donatur yang tidak mengharapkan imbal balik atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah yang diberikan.
2. Barang atau jasa yang dihasilkan tidak bertujuan untuk mengumpulkan laba. Jika entitas mendapatkan keuntungan dari barang atau jasa yang diperoleh, dana tersebut digunakan untuk kepentingan publik.
3. Organisasi nirlaba tidak mempunyai kepemilikan. Artinya, organisasi tidak dapat dijual atau dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain.

Menurut Nordiawan (2009), karakteristik organisasi sektor publik yang membedakan dengan organisasi privat adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak mempunyai tujuan untuk mencari keuntungan finansial.
- 2) Kepemilikan bersifat kolektif oleh pihak publik.
- 3) Tidak dapat diperjualbelikan.
- 4) Keputusan-keputusan yang terkait kebijakan operasional didasarkan pada konsensus.

Perkembangan organisasi publik di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi. Berikut adalah faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan organisasi publik di Indonesia:

1. Faktor Politik: Kondisi politik dalam negeri, seperti stabilitas politik, kebijakan pemerintah, dan perubahan rezim, dapat mempengaruhi arah dan kebijakan organisasi publik. Keterlibatan politik dalam pengangkatan pejabat publik dan manajemen organisasi publik.
2. Faktor Ekonomi : Kondisi ekonomi makro, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan nilai tukar mata uang, dapat mempengaruhi anggaran dan sumber daya organisasi publik. Kebijakan ekonomi pemerintah yang memengaruhi sektor-sektor ekonomi yang relevan dengan organisasi publik.
3. Faktor Sosial : Perubahan demografi dan struktur sosial masyarakat, seperti pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan perubahan nilai-nilai sosial, dapat mempengaruhi permintaan akan layanan publik. Tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat terhadap hak-hak mereka, yang dapat memengaruhi tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas organisasi publik.
4. Faktor Budaya : Nilai-nilai budaya yang berkembang dalam masyarakat, seperti norma-norma etika dan kepatuhan terhadap hukum, dapat memengaruhi praktek manajemen dan operasional organisasi publik. Keterlibatan lembaga keagamaan dan adat dalam pengambilan keputusan dan implementasi program organisasi publik.
5. Faktor Teknologi : Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang cepat dapat mempengaruhi cara organisasi publik berinteraksi dengan masyarakat dan menyediakan layanan publik. Adopsi teknologi baru dalam operasional organisasi publik yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan.

Faktor-faktor ini saling terkait dan saling memengaruhi dalam menentukan arah dan perkembangan organisasi publik di Indonesia. Upaya untuk memahami dan mengelola faktor-faktor ini dengan baik dapat membantu organisasi publik dalam mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan.

Sementara itu Steers (1980) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mendukung keberhasilan akhir suatu organisasi dapat ditemukan dalam 4 kelompok umum. Keempat kelompok umum tersebut adalah:

- 1) Karakteristik organisasi terdiri dari struktur dan teknologi organisasi. Yang dimaksudkan dengan struktur adalah hubungan yang relative tetap sifatnya seperti dijumpai dalam organisasi, sehubungan dengan susunan sumber daya manusia. Struktur adalah cara unik suatu organisasi menyusun orang-orangnya untuk menciptakan sebuah organisasi. Dengan demikian pengertian struktur meliputi faktor-faktor seperti luasnya desentralisasi pengendalian, jumlah spesialisasi pekerjaan, cakupan perumusan interaksi antar pribadi, dan seterusnya. Keputusan mengenai cara bagaimana orang-orang akan dikelompokkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Di lain pihak, yang dimaksud dengan teknologi adalah mekanisme suatu organisasi untuk mengubah masukan mentah menjadi keluaran jadi. Teknologi dapat memiliki berbagai bentuk, termasuk variasi-variasi dalam proses mekanis yang digunakan dalam produksi, variasi dalam bahan yang digunakan dan variasi dalam pengetahuan teknis yang dipakai menunjang kegiatan menuju sasaran.
- 2) Karakteristik lingkungan, mencakup 2 aspek yaitu pertama adalah lingkungan. ekstern, yaitu semua kekuatan yang timbul diluar batas-batas. organisasi dan mempengaruhi keputusan serta tindakan di dalam organisasi (contoh: kondisi ekonomi pasar, peraturan pemerintah). Yang kedua, adalah lingkungan intern, yang dikenal sebagai iklim organisasi meliputi macam-macam atribut lingkungan kerja (contoh: pekerja sentries, orientasi pada prestasi) yang sebelumnya telah ditunjukkan mempunyai hubungan dengan segi-segi tertentu dari efektifitas, khususnya atribut- atribut yang diukur pada tingkat individual (contoh: sikap kerja, prestasi).
- 3) Karakteristik pekerja. Perhatian harus diberikan kepada perbedaan individual. antara para pekerja dalam hubungannya. dengan efektifitas. Pekerja yang berlainan mempunyai pandangan, tujuan, kebutuhan dan kemampuan yang berbeda-beda. Variasi sifat manusia ini sering menyebabkan perilaku orang berbeda satu sama lain, walaupun mereka ditempatkan di satu lingkungan kerja yang sama. Lagi pula perbedaan-perbedaan individual ini dapat mempunyai pengaruh yang langsung terhadap dua proses yang penting, yang dapat berpengaruh nyata terhadap efektifitas. Yaitu rasa keterikatan terhadap organisasi atau jangkauan identifikasi para pekerja dengan atasannya dan prestasi kerja individual, tanpa rasa keterikatan dan prestasi, efektifitas adalah mustahil.
- 4) Kebijakan dan praktek manajemen, peranan manajemen dalam prestasi organisasi meliputi variasi gaya, kebijakan dan praktek kepemimpinan dapat memperhatikan atau merintangi pencapaian tujuan. Peran manajer memainkan peran sentral dalam keberhasilan suatu organisasi melalui perencanaan, koordinasi dan memperlancar kegiatan yang ditujukan kearah sasaran, Kewajiban mereka untuk menjamin bahwa struktur organisasi konsisten dan menguntungkan untuk teknologi dan lingkungan yang ada

Dengan memproyeksi perkembangan organisasi publik di Indonesia ke depan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa tren dan dinamika yang sedang terjadi saat ini dengan cara :

- a. Peningkatan Keterbukaan dan Akuntabilitas : Organisasi publik di Indonesia diperkirakan akan semakin mendorong keterbukaan informasi dan akuntabilitas dalam mengelola kebijakan dan sumber

daya publik. Hal ini akan diikuti dengan peningkatan penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi.

- b. Penguatan Good Governance : Terjadi peningkatan kesadaran akan pentingnya good governance di semua tingkatan organisasi publik. Hal ini akan mengarah pada peningkatan dalam penerapan prinsip-prinsip good governance, termasuk partisipasi publik dalam pengambilan keputusan.
- c. Peran Strategis BUMN dan BUMD : BUMN dan BUMD diperkirakan akan terus menjadi motor penggerak ekonomi nasional, dengan lebih fokus pada pencapaian tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.
- d. Pengembangan Sumber Daya Manusia : Organisasi publik di Indonesia akan lebih fokus pada pengembangan sumber daya manusia, termasuk peningkatan kapasitas, keterampilan, dan profesionalisme pegawai, serta penerapan sistem reward dan punishment yang lebih efektif.
- e. Adopsi Teknologi Digital : Organisasi publik di Indonesia akan semakin mengadopsi teknologi digital, seperti big data, kecerdasan buatan, dan teknologi blockchain, untuk meningkatkan efisiensi, kualitas layanan, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat.
- f. Penguatan Kerjasama Internasional : Organisasi publik di Indonesia akan semakin aktif dalam kerjasama internasional, baik dalam hal pertukaran pengalaman maupun peningkatan kapasitas dalam menghadapi isu-isu global.

Dengan memperhitungkan tren dan dinamika tersebut, proyeksi perkembangan organisasi publik di Indonesia ke depan akan mengarah pada peningkatan kualitas layanan publik, efisiensi pengelolaan sumber daya, dan kontribusi yang lebih besar dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan politik nasional.

KESIMPULAN

Dari hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa mereka memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan politik di negara ini. Dari lembaga pemerintahan hingga BUMN, BUMD, Organisasi kemasyarakatan, LSM, dan organisasi internasional, setiap jenis organisasi publik memiliki peran uniknya dalam mendukung pembangunan nasional. Namun, ada tantangan yang perlu dihadapi oleh organisasi publik di Indonesia, seperti masalah korupsi, birokrasi yang kompleks, dan tantangan dalam penerapan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan upaya terus-menerus untuk meningkatkan tata kelola organisasi publik, memperkuat integritas, transparansi, dan akuntabilitas, serta mengadopsi teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan kerjasama antarorganisasi, dan penerapan prinsip good governance akan menjadi kunci dalam memastikan bahwa organisasi publik di Indonesia dapat berfungsi secara optimal dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Ada pula faktor-faktor yang mempengaruhi serta mendukung agar organisasi pelayanan publik berjalan dengan baik yaitu faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial, faktor budaya dan teknologi

DAFTAR PUSTAKA

- Aykac, Burhan and Metin, Hatice. (2012). The future of public organizations. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 62 (2012) 468 – 4427.
- Bakry, U. S. 2016. *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Pustaka Pelajar.

- Fauzi, Gamawan. (2015). *Urgensi UU Ormas Dalam Memperkokoh NKRI*, Jurnal Kementerian Sekretariat Negara RI, 29.
- Gaffar, Affan. 2006. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta .
- Hasibuan, Malayu. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta:PT. Bumi Aksara
- <http://jurnafis.antan.ac.id/index.php/Proyeksi>
- https://e-journal.uajy.ac.id/28530/3/180424447_Bab%202.pdf
- [https://elearning.unibabpn.ac.id/course/info.php?id=851#:~:text=Menurut%20Wursanto%20\(2002%3A%20259\),dapat%20mencapai%20sasaran%20yang%20ditetapkan.](https://elearning.unibabpn.ac.id/course/info.php?id=851#:~:text=Menurut%20Wursanto%20(2002%3A%20259),dapat%20mencapai%20sasaran%20yang%20ditetapkan.)
- Schraeder, M., Tears, R. S., & Jordan, M. H. (2005). *Organizational culture in public sector organizations*. Leadership & Organization Development Journal.
- Schraeder, M., Tears, R. S., & Jordan, M. H. (2005). *Organizational culture in publicsector organizations*. Leadership & Organization Development Journal.
- Sinambela, Lijan Poltak,dkk. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik*. Bumi Aksara, Jakarta
- Sobirin, A. (2009). *Budaya Organisasi*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan.
- Sobirin, A. (2009). *Budaya Organisasi*. Yogyakarta:Unit Penerbit dan Percetakan
- Suprayitno, Khomsiyah, Sedarnawati Yasni, Darmawati, dan Aries Susanty. 2005. *Internalisasi Good Corporate Governance dalam Proses Bisnis*. Jakarta: TheIndonesian Institute for Corporate Governance bekerjasama dengan Dankos dan Bank Mandiri.